

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

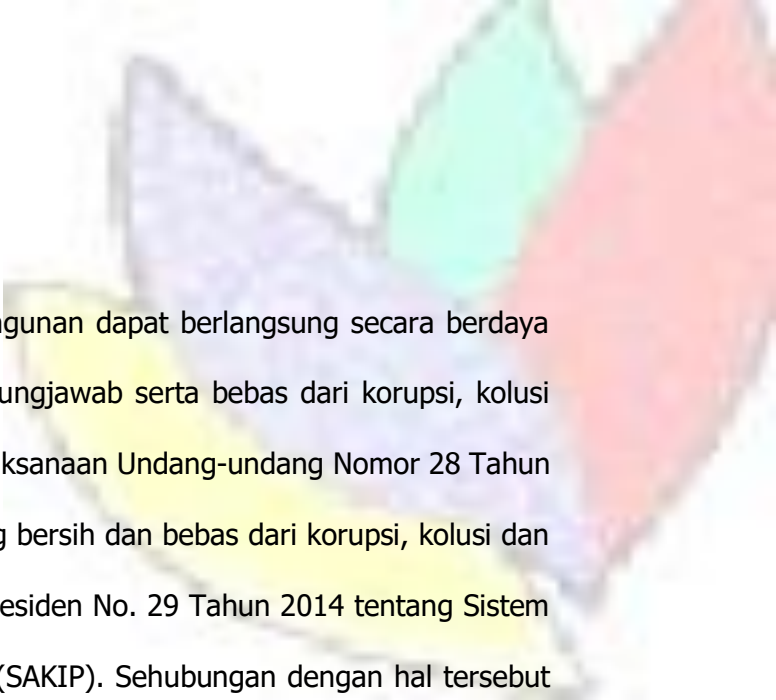
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sumur Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga



penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Sumur Bandung

Kecamatan Sumur Bandung adalah salah satu kecamatan tertua di Kota Bandung. Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung pada awalnya ditetapkan berdasarkan



pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Bandung.

Batas wilayah administratif Kecamatan Sumur Bandung dibatasi oleh :

Bagian Selatan : Kecamatan Regol dan Lengkong

Bagian Utara : Kecamatan Bandung Wetan

Bagian Timur : Kecamatan Batununggal

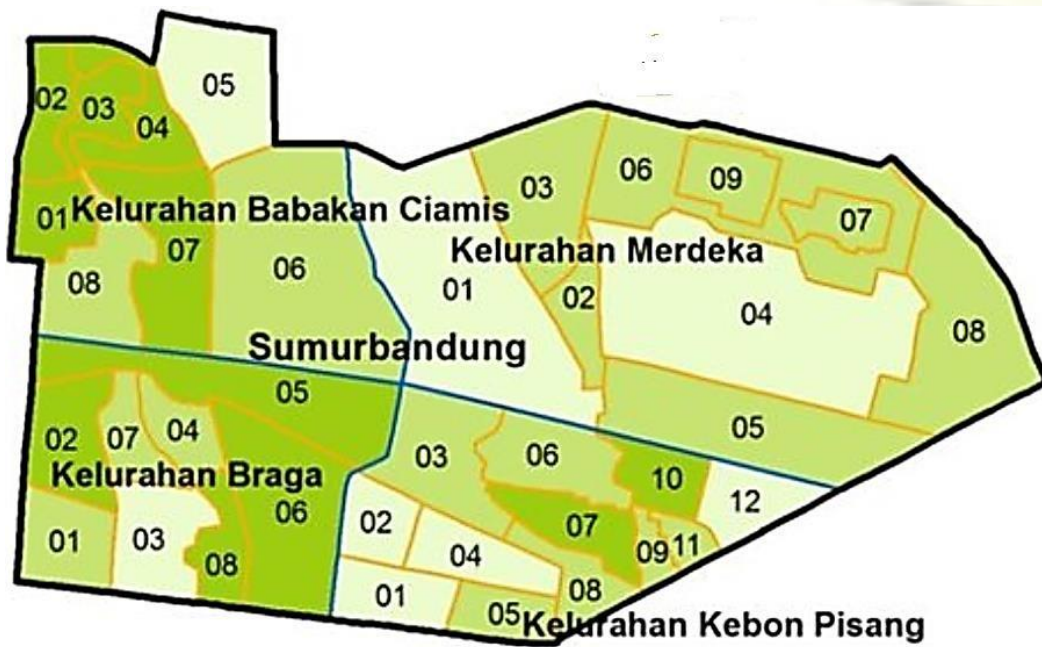
Bagian Barat : Kecamatan Andir dan Cicendo

Kecamatan Sumur Bandung terdiri dari 4 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Braga
2. Kelurahan Kebon Pisang
3. Kelurahan Babakan Ciamis
4. Kelurahan Merdeka

Kecamatan Sumur Bandung meliputi luas wilayah 340 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 35.333 jiwa dan 10.188 Kepala Keluarga yang terdiri dari 37 Rukun Warga dan 231 Rukun Tetangga.


Gambar. I.2
Peta Wilayah
Kecamatan Sumur Bandung



1.3. Tugas dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian



kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.


1.4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT RW Kota Bandung



yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen Publik (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut

Tabel 1.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.	Aspek	Indikator
1	<i>Bandung Unggul</i>	1. PIPPK Plus
		2. Pusat Kreatifitas Pemuda Per Wilayah
		3. Youthspace di Setiap Kelurahan
		4. Perpustakaan Keliling / Kecamatan
		5. Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Per Kelurahan
		6. Kampung Wisata di Setiap Wilayah
2	<i>Bandung Nyaman</i>	1. Revitalisasi Sarana Olahraga per Kecamatan
		2. Bank Sampah Per Kecamatan
3	<i>Bandung Sejahtera</i>	1. Pusat Pemberdayaan ekonomi dan Kreatifitas masyarakat (Co-Working space) Per Kecamatan
		2. Peningkatan Insentif RT dan RW
		3. Menciptakan Satu Koperasi Juara Setiap Kelurahan
4	<i>Bandung Agamis</i>	1. Peningkatan Insentif Guru Mengaji
		2. Satu koperasi Masjid di Setiap Masjid Jami' Kelurahan
		3. Gerakan Menyemarakkan Rumah Ibadah

1.5. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 050/ Kep. 17.a / Kec.Sur.Ban / 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dan stakeholder.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bandung : *Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,*

- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : *Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan*

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “*Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat*”.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. **Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing**
Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani
Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	78	79	81	82	83
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	25	25	50	50	75
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	24,87	24,87	48,79	48,78	73,68

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966-Orpad/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	Merupakan IKU/PK dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	<p>Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Kepengurusan

- Gardu Sosial
- Lumbung sosial
- Peta Rawan Bencana
- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana
- 3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)
 - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca
 - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp
 - Koran2 / majalah langganan kelurahan
 - Ada laporan pengunjung
- 4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah
 - petunjuk arah ke masjid
 - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alm waktu sholat
- 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)
 - SK / SP
 - Ada Program Kerja
 - Monitoring Rawan Jentik
 - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu
 - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
- 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)
 - Data terpilah
 - satgas Pengarusutamaan gender (PUG)
 - Pelatihan pelatihan
 - Perlindungan bagi perempuan (KDRT)
- 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)

					<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2020) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan
--	--	--	--	--	--

					<p>c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</p> <p>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas</p> <p>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p> <p>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	<p>% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif</p> <p>% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi :</p> <p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS

Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :

1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;
2. Balai RW/Markas Karang Taruna;
3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll)
4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;
5. Gapura Kujang;
6. Satu Kampung Satu Produk;
7. Kampung Berkebun;
8. Kampung Caang Baranang;
9. MCK komunal;
10. Pavingisasi
11. Gerakan satu rumah satu tanaman;
12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng
13. Media Kampanye Kampung Unggul
14. Satu Rumah satu jumantik
15. Laporan RW tepat waktu minimal form A :
 - a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)
 - b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)
 - c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni
16. RW berdaya
 - a. Ada kepengurusan
 - b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)

					<p>c. Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)</p>
					<p>% LKK Unggul Kriteria LKK Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan) 2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun
					<p>% Siskamling RW Aktif Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

2.1.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung	1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	79
		2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	3. Persentase Kelurahan Unggul	%	25
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	4. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	24,87

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumur Bandung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020, sebagai berikut :

2.2.3. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Sumur Bandung terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Sumur Bandung di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Isu Strategis RPJMD yang sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
2. Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Isu Strategis RPJMD yang sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

2. Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (S1.1)	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	78	79	81	82	83
			Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se-Kecamatan Sumur Bandung	78	79	81	82	83
			Meningkatnya Peran Kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	25%	25%	50%	50%	75%
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kepada Program Pemerintah Dalam Pembangunan Wilayah	24,87%	24,87%	48,78%	48,78%	73,68%
			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	24,87%	24,87%	48,78%	48,78%	73,68%

2.2.4. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumur Bandung serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumur Bandung hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	Merupakan IKU/PK dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi di bawah ini : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) <ul style="list-style-type: none"> - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan

					<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Kepengurusan - Gardu Sosial - Lumbung sosial - Peta Rawan Bencana - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana 3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) <ul style="list-style-type: none"> - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah <ul style="list-style-type: none"> - petunjuk arah ke masjid - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alm waktu sholat 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik
--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per-minggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Data terpilah - Satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 8. Septic Tank Komunal (Ekbang) <ul style="list-style-type: none"> - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)
--	--	--	--	--	--

					<p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2020) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggota Koperasi \geq 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada Pengurus
--	--	--	--	--	---

						<ul style="list-style-type: none"> - Ada Anggota - Ada AD/ART
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif	<p>% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi :</p> <p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS <p>Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 2. Balai RW/Markas Karang Taruna; 3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll)

					<ol style="list-style-type: none"> 4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang; 5. Gapura Kujang; 6. Satu Kampung Satu Produk; 7. Kampung Berkebun; 8. Kampung Caang Baranang; 9. MCK komunal; 10. Pavingisasi 11. Gerakan satu rumah satu tanaman; 12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng 13. Media Kampanye Kampung Unggul 14. Satu Rumah satu jumantik 15. Laporan RW tepat waktu minimal form A : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 16. RW berdaya <ol style="list-style-type: none"> a. Ada kepengurusan b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) c. Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)
					% LKK Unggul

					<p>Kriteria LKK Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan) 2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun
					<p>% Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pengurus 2. Adanya Kelompok Siskamling 3. Adanya Jadwal Siskamling 4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling 5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)

2.2.5. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sumur Bandung hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	79,00
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	25,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	24,87

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA




Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Sumur Bandung.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja


Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumur Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 090/341-Bag.Orpad/2019, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/08.a-Kec.Surban tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	79	83.58	105.80
2	Persentase Kelurahan Unggul	%	25	100	400.00
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	24.87	79,28	318.78

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung, dengan capaian kinerja 105.80 %, pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 400 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja 318.78 %.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sumur Bandung Kota

Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung	Nilai	79	83.58	105.80
2	Persentase Kelurahan Unggul	%	25	100	400.00
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	24.87	79.28	318.78

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	100.00%
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

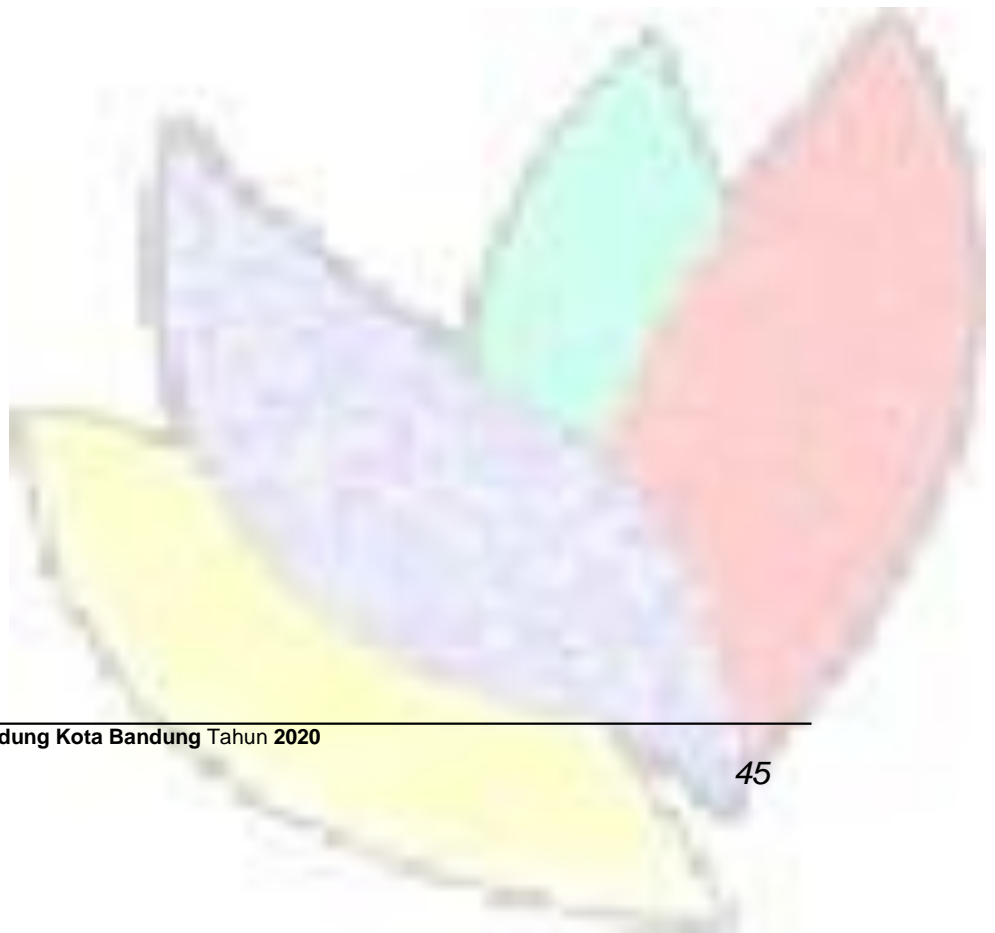
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota

Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di
Kecamatan Sumur Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan <i>Sumur</i> Bandung	Nilai	78	78,64	100.82	79	83.58	105.80

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sumur Bandung dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

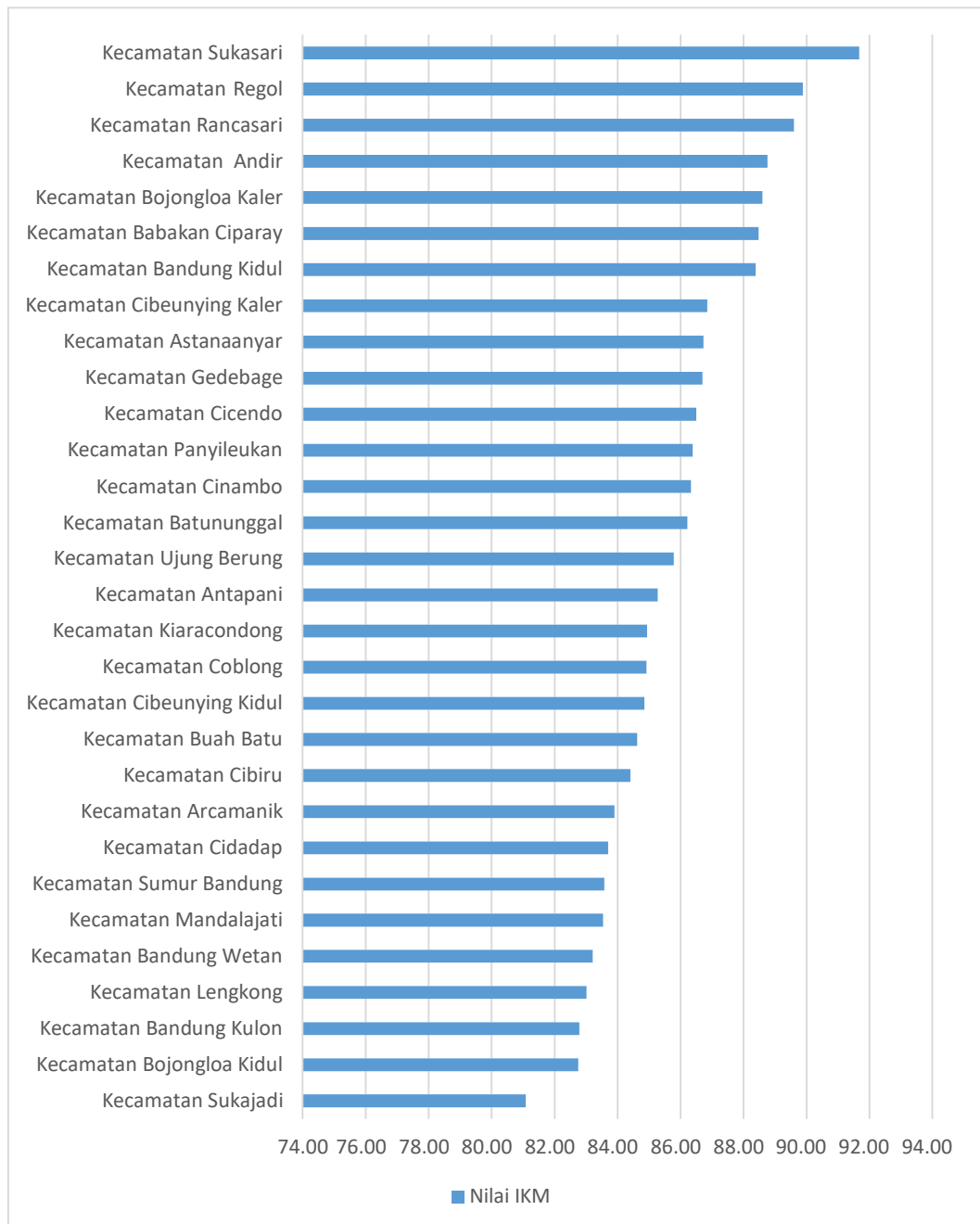
Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung" adalah sebesar 83.58 dari target sebesar 79 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 105.80 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sumur Bandung" tahun ini adalah sebesar 105.80 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Sumur Bandung maka capaian kerjanya mencapai 100.70 %.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1 dengan Target akhir Renstra
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di
Kecamatan Sumur Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Akhir Renstra		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan <i>Sumur</i> Bandung	Nilai	79	83.58	79	83	83.58	100.70

Grafik 3.1
Perbandingan rata-rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung



Diambil dari Sumber data: <http://skm.bandung.go.id/hasilsurvei>

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sumur Bandung sudah cukup dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. tetapi masih dibawah nilai IKM yang tertinggi diperoleh oleh Kecamatan Sukasari dengan Capaian 91,67 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Sukajadi dengan Capaian 81,08. Kecamatan Sumur Bandung sendiri memperoleh rata rata IKM sebesar 83,58 jika dibandingkan dengan Kecamatan lain yang juga terdiri dari 4 (empat) Kelurahan seperti Kecamatan Cidadap, Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Regol, Kecamatan Sumur Bandung masih lebih rendah dalam rata rata IKM. Hal ini, bisa

diakibatkan karena kondisi kantor Kecamatan dan terutama ruang pelayanan yang relatif kurang representatif. Kondisi kantor Kecamatan Sumur Bandung dan Ruang pelayanan dinilai kurang representatif sebagai kantor kecamatan yang berada di pusat Kota Bandung dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada dipinggiran Kota Bandung, hal tersebut dikarenakan dalam DPA Kecamatan Sumur Bandung dari tahun 2020 belum menganggarkan perbaikan/ rehab gedung kantor karena keterbatasan dana APBD Kota Bandung.

Akan tetapi yang menjadi nilai positif adalah Nilai IKM Kecamatan Sumur Bandung ini sudah melampaui nilai IKM beberapa Kecamatan yang sudah memiliki ruang pelayanan yang lebih representatif. **Pelaksanaan hasil survey mandiri yang dilakukan terhadap Aspek Pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung Dilakukan minimal 2 Kali dalam setahun selalu memiliki nilai yang BAIK** melalui aplikasi yang dapat diakses melalui website dengan alamat <https://www.skm.bandung.go.id> yaitu sebesar 83,58 yang berada dalam Kategori Mutu BAIK (B). Pelaksanaan surveynya dilaksanakan pada semester pertama dengan capaian 83.33 dan capaian semester kedua sebesar 83.82. Jika dirata ratakan maka indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Sumur Bandung adalah 83.58 nilai.

Tabel 3.8
Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Semester I dan II
Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020

NO	NAMA SKPD/UNIT KERJA	HASIL PENILAIAN TAHUN 2020							
		SEMESTER 1				SEMESTER 2			
		NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	NILAI INDEKS	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Kecamatan Sumur Bandung	3.333	83.33	B	Baik	3.353	83.82	B	Baik

Sumber: <http://skm.bandung.go.id/hasilurvei>

Tabel 3.9
Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020

NO	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Parameter	Kec. Sumur Bandung	Kel. Braga	Kel. Merdeka	Kel. Kebon Pisang	Kel. Babakan Ciamis	Rata-rata	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	rata rata hasil survey IKM Kecamatan dan Kelurahan	78	Nilai	IKM Kec. Sumur Bandung	83.58						105.80 %

LKIP Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu, 0.11, sebagai berikut

Tabel. 3.10
Indeks Per Unsur Pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN		NILAI UNSUR
			PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan	(U1)	3.31
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	(U2)	3.33
3	Waktu Penyelesaian	(U3)	3.37
4	Biaya/Tarif	(U4)	3.88
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	(U5)	3.22
6	Kompetensi Pelaksana	(U6)	3.39
7	Perilaku Pelaksana	(U7)	3.25
8	Sarana dan Prasarana	(U8)	3.23
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	(U9)	3.13
10	Nilai Unsur Tertinggi		3.88
11	Nilai Unsur Terendah		3.13

Dari tabel di atas dapat kita lihat untuk Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

- a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut: U9, U5, dan U8.
- b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut: U4, U6 dan U3.

Pic. 3.1
Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat



Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaraan dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)	Outout dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terpenuhinya kebutuhan Pakaian dinas dan Pakaian Khusus hari hari tertentu
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outout dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terpenuhinya kebutuhan Pembinaan Kinerja Aparatur
5.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya dokumen Laporan Bidang Pemeliharaan drainase dan kebersihan lingkungan, laporan bidang pemeliharaan RTH Kecamatan dan laporan pengecatan kerb

6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya dokumen Laporan Bidang keamanan dan kenyamanan lingkungan
7.	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya dokumen Laporan Bidang SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
8.	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya dokumen Laporan Bidang Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
9.	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya dokumen Laporan Bidang Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
10.	Pemberdayaan KUMKM	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya dokumen Laporan Bidang Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

**Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Pertama
"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	1,027,132,736.26	830,343,262.00	80.84%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	119,150,480.00	87,667,457.00	73.58%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah laporan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	29,800,000.00	9,888,400.00	33.18%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah laporan jasa kebersihan kantor bulanan	3,660,000.00	3,550,000.00	96.99%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	19,500,000.00	13,770,000.00	70.62%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket penyediaan ATK	82,123,170.25	79,055,145.00	96.26%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	98,866,600.00	82,137,900.00	83.08%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan	8,286,100.00	7,607,500.00	91.81%
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	38,398,700.00	29,324,900.00	76.37%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	43,575,700.00	29,847,000.00	68.49%

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	19,567,000.00	15,994,000.00	81.74%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	120,954,818.01	91,222,960.00	75.42%
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50,000,168.00	5,028,000.00	10.06%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga pen dukung adminis trasi perkantoran / teknis perkantoran	393,250,000.00	375,250,000.00	95.42%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	679,777,666.00	575,615,330.00	84.68%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung yang terpelihara	210,357,666.00	208,948,381.00	99.33%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional terpelihara	469,420,000.00	366,666,949.00	78.11%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Panjang Jalan dalam keadaan baik	1,533,062,670.00	1,507,473,230.00	98.33%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Daftar nominatif pelayanan lengkap	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%
Kegiatan Pembinaan RT RW	RW Terbina	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%
Jumlah		3,550,801,737.26	3,222,029,835.00	90.74%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung Capaian Kinerja

- a. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan
- b. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan

- c. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Sumur Bandung
- d. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat
- e. Peran aktif masyarakat Kecamatan Sumur Bandung
- f. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Sumur Bandung

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

- Penyerapan anggaran yang besar di akhir tahun anggaran, dikarenakan regulasi mengenai Honorarium Non PNS dan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber yang terlambat dan belum maksimal sehingga penyerapan anggaran terhambat.
- Kurang Pahaminya warga masyarakat mengenai SOP Pelayanan dan persyaratan dalam pelayanan public
- Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya.
- Ditolaknya APBD Perubahan
- Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Sumur Bandung
- Kurangnya jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang

- a. Mengajukan tambahan SDM kepada BKPP di Kecamatan Sumur Bandung

- b. Penguatan Regulasi dan atau aturan ditetapkan lebih cepat dan dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir SOP, Prosedur dan regulasi mengenai pelayanan public akan dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat
- c. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Sumur Bandung lebih ditingkatkan.
- d. Lebih mematangkan perencanaan sehingga tidak memerlukan APBD Perubahan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Sumur Bandung maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Indikator ini sudah melekat dan menjadi kewajiban dari OPD untuk segera menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi temuan baik oleh BPK ataupun Inspektorat. Hal ini diupaya untuk menjaga agar predikat hasil pemeriksaan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Sasaran 2

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Persentase Kelurahan Unggul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	25	38,46	153.00	25	100	400%

Tabel 3.13
Rekapitulasi Jumlah kriteria Kelurahan Unggul terealisasi

NO	Kriteria Kelurahan Unggul	Kelurahan Unggul			
		BRAGA	MERDEKA	KEBON PISANG	BABAKAN CIAMIS
1	Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)	v	V	v	v
2	Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)	v		v	v
3	Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)	v	V	v	v
4	Gerakan menyemarakkan tempat ibadah	v	V	v	v
5	Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)	v	V	v	v
6	Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)		V		
7	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)		V		v
8	Septic Tank Komunal (Ekbang)	v	V	v	v
9	Bank sampah per kelurahan (Ekbang)	v	V	v	v
10	Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)		V		v
11	Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)	v	V	v	v
12	Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)				v
	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF	8	10	8	11
	minimal 7 dari 12 jenis	UNGGUL	UNGGUL	UNGGUL	UNGGUL

Sasaran Meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 100 dari target sebesar 25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 400.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Empat kelurahan yang ada di Kecamatan Sumur Bandung dikategorikan sebagai kelurahan unggul, dimana masing masing kelurahan sudah

memenuhi kriteria kelurahan unggul, yaitu minimal 7 dari 12 kriteria. Kelurahan yang paling sedikit pemenuhan persyaratan terendah nya di 8 kriteria. Harapannya di tahun selanjutnya, seluruh kelurahan di Kecamatan Sumur Bandung menjadi kelurahan unggul yang memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan.

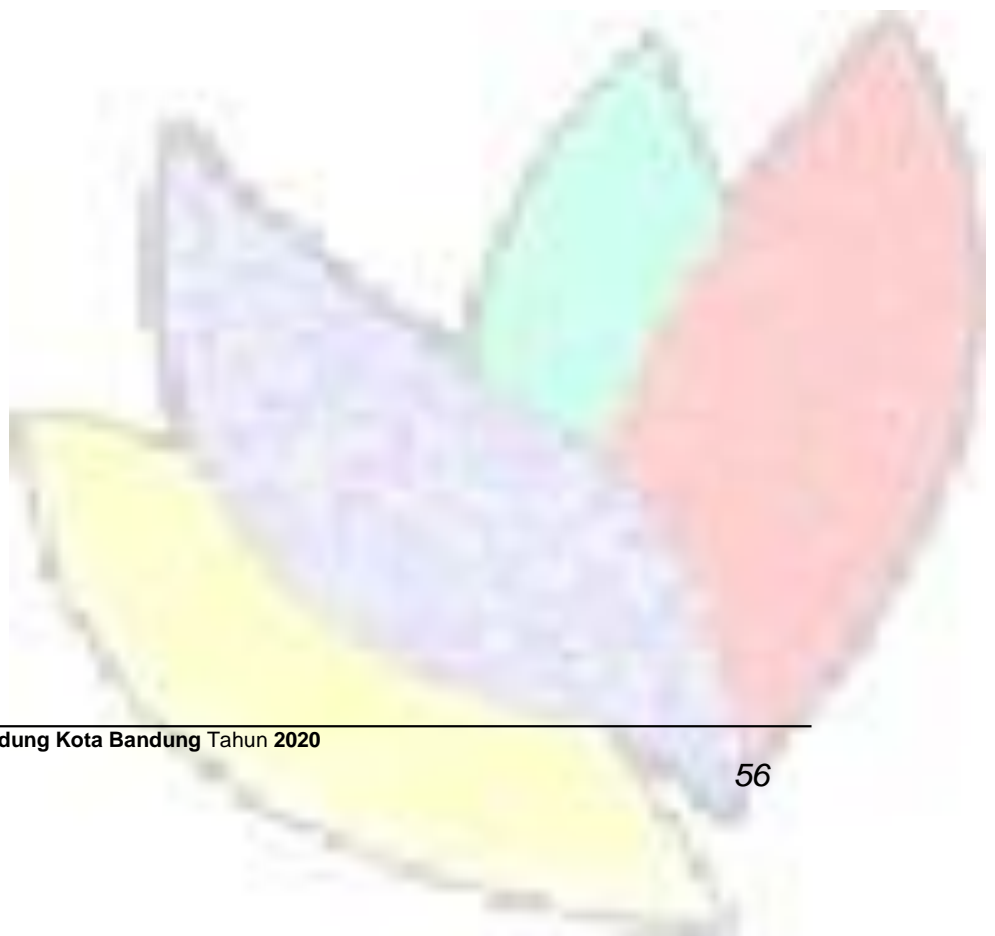
Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini meningkat 266.67 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 38.46 Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 400.00 %.

Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Sumur Bandung maka capaian kerjanya mencapai 133.33 %. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul".

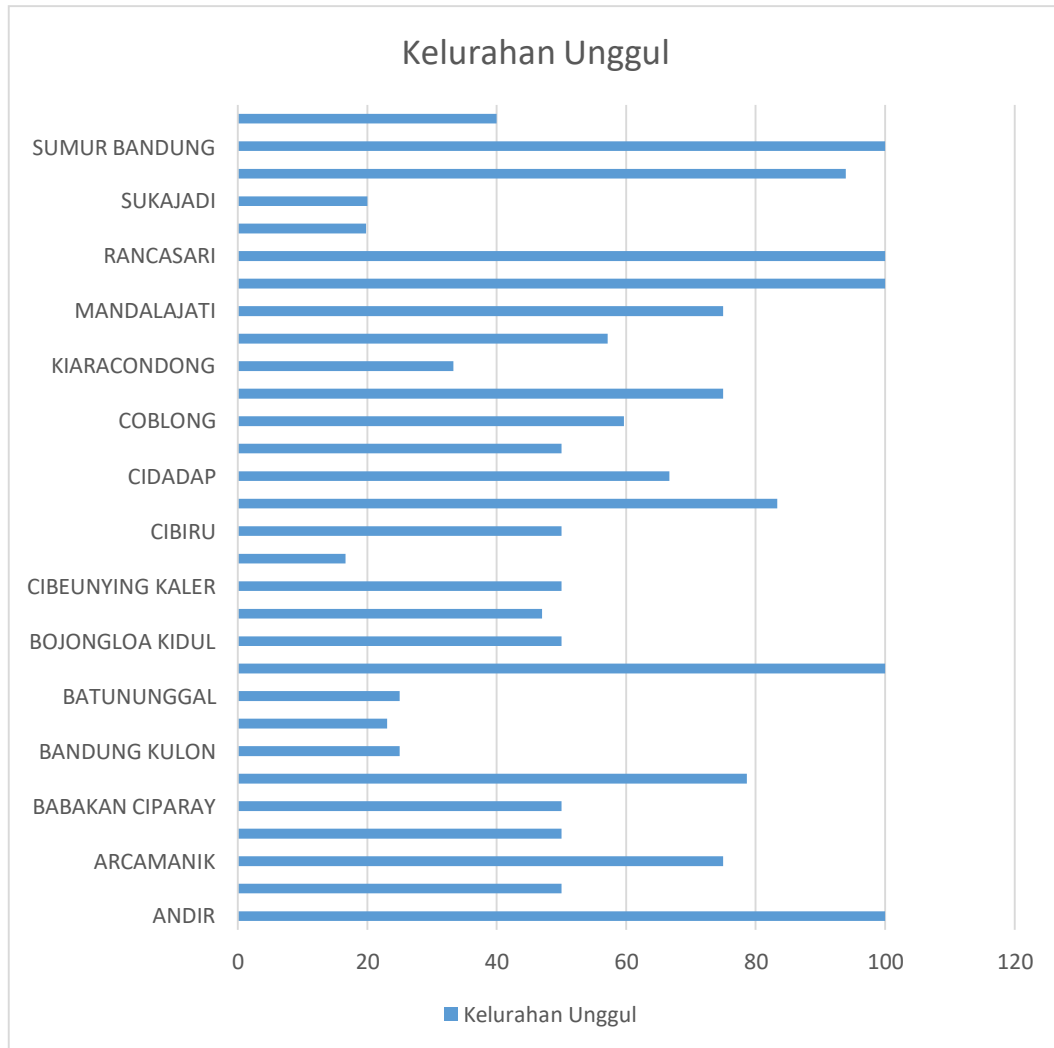
Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 2 dibandingkan dengan target akhir Renstra Persentase Kelurahan Unggul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Akhir Renstra		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	25	100	400%	75	100	133.33 %

adapun untuk melihat perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut :



Grafik 3.2
Perbandingan
Persentase Kelurahan Unggul di Kota Bandung



Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Pertama
"Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan"

Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Kelurahan Unggul	1,477,635,300.00	1,350,438,200.00	91.39%
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah Koperasi di Tempat Ibadah	20,012,000.00	-	0.00%
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah siskamling aktif	1,132,112,000.00	1,096,395,750.00	96.85%
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader Pemberdayaan Kewilayahan Aktif	288,108,800.00	229,822,700.00	79.77%
Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	25,034,000.00	12,220,000.00	48.81%
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah peserta musrenbang	12,368,500.00	11,999,750.00	97.02%

Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	24.87	52,08	209.00	24.87	79.28	318.78

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" adalah sebesar 79.28 dari target sebesar 24.87 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 318.78 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini meningkat 109.78 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 209.00

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 318.78 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Sumur Bandung maka capaian kerjanya mencapai 108.60 %.

Untuk menghitung tingkat pemberdayaan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain, RW unggul, LKK Unggul dan Siskamling aktif. Untuk menghitung RW Unggul itu sendiri harus menghitung kriteria yang dipersyaratkan antara lain, melaksanakan Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat, melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi yang dipersyaratkan.



**RW YANG MEMENUHI STANDAR RW JUARAKECAMATAN SUMUR BANDUNG
TAHUN 2020**

Rumus Rata-rata RWjuara $\frac{\sum_{i=1}^3 \text{Persentase RW juara}}{3}$

JUMLAH RW DI KECAMATAN SUMURBANDUNG 37 RW

$\frac{\sum_{i=1}^3 \text{Persentase RW juara}}{3}$	KRITERIA (I + II + III)	3	X 100%	=	203%	X	=	67.57%
		3			3	100%		

1 Metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :		BRAGA								MERDEKA								KEBON PISANG								BABAKAN CIAMIS											
NO	KRITERIA	RW								RW								RW								RW											
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
a	Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
b	Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0
c	Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

d	Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e	Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		0	0	1	1	1	1	0	1		1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	
		5					6					4					3																								
JUMLAH RW YANG MEMILIKI KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENGELOLA SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT		18																																							
<small>Jumlah RW yang memiliki Kelompok Masyarakat yang mengelola sampah minimal 1 metode pengelolaan sampah berbasis masyarakat</small> <small>Jumlah RW se Kecamatan</small>		18		x 100%		= 48.65%																																37			

2	Syarat Administratif, RW Menyampaikan :																																							
NO	KRITERIA	BRAGA								MERDEKA									KEBON PISANG												BABAKAN CIAMIS									
		RW								RW									RW												RW									
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
a	Menyampaikan Lap Rutin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3 Kriteria RW Juara, terdapat minimal /melaksanakan/terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini																																																
NO	KRITERIA	BRAGA								MERDEKA								KEBON PISANG								BABAKAN CIAMIS																						
		RW								RW								RW								RW																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8										
1	Satu Kampung Satu Taman Bermain	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1																															
2	Balai RW/Markas Karang Taruna;	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1							1	1				1	1								1	-	1	-	1	-	-	1	1	
3	Sanggar seni Sunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-						1					1	-	-	1	-	-	-	-	1	-									
4	Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1														1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Gapura Kujang;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Satu Kampung Satu Produk;	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1		1	1	1	-	1							1	1	1	1		1	1								1	1	-	1	1	-	-	-	1	1
7	Kampung Berkebun;	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1							1	1	1	1	1	1	1	1								1	-	-	1	-	-	-	-	
8	Kampung Caang Baranang;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																					1	1	1	1	-	1	1	1		
9	MCK komunal;	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1																					1	1	1	-	-	-	-	-	1	

**Rekapitulasi RW UNGGUL
Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020**

Kriteria RW Juara	Braga	merdeka	Kebon Pisang	BBC	rata-rata
Metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat	14%	16%	10.8%	8.11%	48.65%
Syarat Administratif, RW Menyampaikan :	21.62%	21.62%	24.32%	22%	89.19%
Kriteria RW Juara, terdapat minimal /melaksanakan/terdapat 7 dari 16 jenis kondisi	18.92%	21.62%	16.22%	8.11%	64.86%
JUMLAH	18.02%	19.82%	17.12%	12.61%	67.57%

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN JUARA
KECAMATAN SUMUR
BANDUNG
TAHUN 2020**

NO	KRITERIA AKTIF	LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF														
		KECAMATAN			KEL. BRAGA			KEL. MERDEKA			KEL. KEBON PISANG			KEL. BABAKAN CIAMIS		
		TP PKK	Karta	LPM	TP PK K	Karta	LPM	TP PKK	Karta	LPM	TP PK K	Karta	LPM	TP PKK	Karta	LPM
1	Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
3	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan melaksanakan minimal 70% dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
4	Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan / lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan	Tidak ada agenda														
5	Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ Kelurahan memenuhi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

	kriteria/ cek list dari BKBPM dan Dinsos minimal 50%																
	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	KRITERIA BAIK (NILAI > 3 ATAU MEMENUHI MINIMAL 4 KRITERIA)	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

PROSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF
=

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kecamatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{15}{15} \times 100\% = 100.00\%$$

**SISKAMLING AKTIF
KECAMATAN SUMUR BANDUNG
TAHUN 2020**

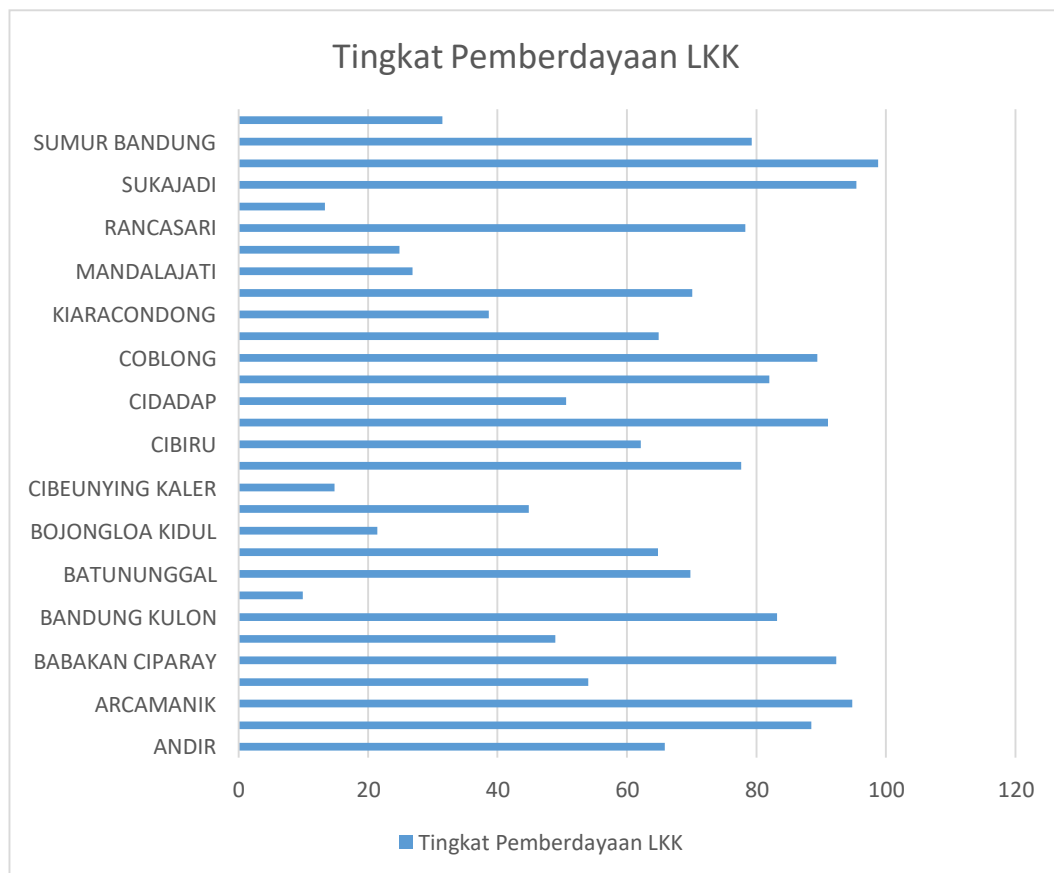
3		Kriteria SISKAMLING AKTIF terdapat 5 kondisi dibawah ini																																							
NO	KRITERIA	KELURAHAN BRAGA								KELURAHAN MERDEKA									KELURAHAN KEBON PISANG									KELURAHAN BABAKAN CIAMIS													
		RW								RW									RW									RW													
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			
1	ADANYA PENGURUS (SK KETUA RW);	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1

Rata rata tingkat pemberdayaan dapat dihitung dengan menghitung % Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif. Dari angka-angka yang diperoleh maka $(67,57 + 100 + 70,27) / 3 = 79,28$. Dengan demikian capaian tingkat pemberdayaan Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020 adalah sebesar 79,28

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini baru di hitung rata rata dari 3 (tiga) kriteria, adapun untuk melihat perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut :

Grafik 3.3

Perbandingan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung



Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Pertama "Tingkat Pemberdayaan masyarakat"

Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	2,288,808,354.47	1,976,474,210.00	86.35%
Pemberdayaan Lingkup RW	Prosentase RW Unggul	1,836,682,372.47	1,559,551,810.00	84.91%
Pemberdayaan lingkup PKK	Prosentase PKK Unggul	175,428,890.00	171,196,100.00	97.59%
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Prosentase Karang Taruna Unggul	91,492,832.00	73,730,000.00	80.59%
Pemberdayaan Lingkup LPM	Prosentase LPM Unggul	185,204,260.00	171,996,300.00	92.87%

3.4 Realisasi Anggaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 19.482.270.053,65 direalisasikan sebesar Rp. 17.488.894.014 atau terealisasi sebesar 89,77 %.

Adapun rincian penyerapan anggaran sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.16
**Realisasi Anggaran BTL dan BL
Kantor Kecamatan Sumur Bandung Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Anggaran 2020		
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Belanja Tidak Langsung	9.731.833.326,92	8.753.537.734	89,95
Belanja Pegawai	9.731.833.326,92	8.753.537.734	89,95
Belanja Langsung	9.750.436.726,73	8.735,356.280,00	89,59
Belanja Pegawai	-	-	0
Belanja Barang dan Jasa	9.086.552.316,47	8.241.003.120,00	90,69
Belanja Modal	663.884.410,26	494.353.160,00	74,46
Total Belanja	19,482,270,053,65	17,488,894,014,00	89,77%

Sedangkan perbandingan rincian realisasi belanja tahun anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
**Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2019 Tahun Anggaran 2018**

Uraian	Anggaran 2020			Anggaran 2019
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Realisasi (Rp.)
Belanja Tidak Langsung	9.731.833.326,92	8.753.537.734	89,95	9,512,023,974,00
Belanja Pegawai	9.731.833.326,92	8.753.537.734	89,95	9,512,023,974,00
Belanja Langsung	9.750.436.726,73	8.735,356.280,00	89,59	11,691,071,657,00
Belanja Pegawai	-	-	0	4,763,000,000,00
Belanja Barang dan Jasa	9.086.552.316,47	8.241.003.120,00	90,69	6,743,052,657,00
Belanja Modal	663.884.410,26	494.353.160,00	74,46	185,019,000,00
Total Belanja	19,482,270,053,65	17,488,894,014,00	89,77%	21,203,095,631,00

Realisasi anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 17,488,894,014.00,- atau turun sebesar 17.52 % dari realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 21.203.095.631.00,-.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Tahun 2020

Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,027,132,736.26	830,343,262.00	80.84%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,150,480.00	87,667,457.00	73.58%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	29,800,000.00	9,888,400.00	33.18%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,660,000.00	3,550,000.00	96.99%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19,500,000.00	13,770,000.00	70.62%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	82,123,170.25	79,055,145.00	96.26%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98,866,600.00	82,137,900.00	83.08%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8,286,100.00	7,607,500.00	91.81%
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,398,700.00	29,324,900.00	76.37%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43,575,700.00	29,847,000.00	68.49%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19,567,000.00	15,994,000.00	81.74%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	120,954,818.01	91,222,960.00	75.42%
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50,000,168.00	5,028,000.00	10.06%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	393,250,000.00	375,250,000.00	95.42%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	679,777,666.00	575,615,330.00	84.68%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	210,357,666.00	208,948,381.00	99.33%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	469,420,000.00	366,666,949.00	78.11%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,533,062,670.00	1,507,473,230.00	98.33%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%
Kegiatan Pembinaan RT RW	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%

Pemeliharaan RTH Kecamatan	1,489,715,900.00	1,470,417,700.00	98.70%
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	43,346,770.00	37,055,530.00	85.49%
Program Perlindungan Sosial Bencana	202,660,000.00	191,400,000.00	94.44%
Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	202,660,000.00	191,400,000.00	94.44%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,477,635,300.00	1,350,438,200.00	91.39%
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	20,012,000.00	-	0.00%
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	1,132,112,000.00	1,096,395,750.00	96.85%
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	288,108,800.00	229,822,700.00	79.77%
Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	25,034,000.00	12,220,000.00	48.81%
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	12,368,500.00	11,999,750.00	97.02%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	2,288,808,354.47	1,976,474,210.00	86.35%
Pemberdayaan Lingkup RW	1,836,682,372.47	1,559,551,810.00	84.91%
Pemberdayaan lingkup PKK	175,428,890.00	171,196,100.00	97.59%
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	91,492,832.00	73,730,000.00	80.59%
Pemberdayaan Lingkup LPM	185,204,260.00	171,996,300.00	92.87%
JUMLAH	8,286,436,726.73	7,494,078,860.00	90.44%

Tabel di atas adalah Program dan Kegiatan yang hanya dibiayai oleh APBD saja. Sementara yang dibawah adalah program kegiatan yang dibiayai dari APBD dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menggulirkan DAU Tambahan untuk kelurahan

Tabel 3.19
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Yang dibiayai APBD dan DAU Tambahan
Tahun 2020

Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,027,132,736.26	830,343,262.00	80.84%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,150,480.00	87,667,457.00	73.58%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	29,800,000.00	9,888,400.00	33.18%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,660,000.00	3,550,000.00	96.99%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19,500,000.00	13,770,000.00	70.62%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	82,123,170.25	79,055,145.00	96.26%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98,866,600.00	82,137,900.00	83.08%

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8,286,100.00	7,607,500.00	91.81%
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,398,700.00	29,324,900.00	76.37%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43,575,700.00	29,847,000.00	68.49%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19,567,000.00	15,994,000.00	81.74%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	120,954,818.01	91,222,960.00	75.42%
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50,000,168.00	5,028,000.00	10.06%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	393,250,000.00	375,250,000.00	95.42%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	679,777,666.00	575,615,330.00	84.68%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	210,357,666.00	208,948,381.00	99.33%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	469,420,000.00	366,666,949.00	78.11%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,533,062,670.00	1,507,473,230.00	98.33%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%
Kegiatan Pembinaan RT RW	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%
Pemeliharaan RTH Kecamatan	1,489,715,900.00	1,470,417,700.00	98.70%
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	43,346,770.00	37,055,530.00	85.49%
Program Perlindungan Sosial Bencana	202,660,000.00	191,400,000.00	94.44%
Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	202,660,000.00	191,400,000.00	94.44%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,477,635,300.00	1,350,438,200.00	91.39%
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	20,012,000.00	-	0.00%
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	1,132,112,000.00	1,096,395,750.00	96.85%
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	288,108,800.00	229,822,700.00	79.77%
Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	25,034,000.00	12,220,000.00	48.81%
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	12,368,500.00	11,999,750.00	97.02%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	2,288,808,354.47	1,976,474,210.00	86.35%
Pemberdayaan Lingkup RW	1,836,682,372.47	1,559,551,810.00	84.91%
Pemberdayaan lingkup PKK	175,428,890.00	171,196,100.00	97.59%
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	91,492,832.00	73,730,000.00	80.59%
Pemberdayaan Lingkup LPM	185,204,260.00	171,996,300.00	92.87%
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	984,783,160.00	784,062,420.00	79.62%
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)	751,848,240.00	567,431,170.00	75.47%
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)	36,644,400.00	36,352,800.00	99.20%
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	167,331,520.00	151,650,400.00	90.63%

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)	28,959,000.00	28,628,050.00	98.86%
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	479,216,840.00	457,215,000.00	95.41%
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)	3,100,000.00	-	0.00%
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)	89,730.00	-	0.00%
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	470,875,110.00	452,133,000.00	96.02%
Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)	5,152,000.00	5,082,000.00	98.64%
JUMLAH	9,750,436,726.73	8,735,356,280.00	89.59%

Rendahnya realisasi anggaran pada tahun 2020 disebabkan telah terjadinya pandemic virus Covid-19 pada kuartal kedua tahun 2020. Pemerintah Kota Bandung melaksanakan beberapa kebijakan kaitan dengan penanganan pandemic Covid-19 ini. Mulai dari refocusing belanja, pengalihan pagu belanja ke penanganan Covid-19.

Dalam perencanaan Anggaran Tahun 2020 pagu Kecamatan Sumur Bandung adalah sebesar Rp. 21.772.180.591,52 pada Bulan April dilaksanakan pergeseran Anggaran sebagai upaya refocusing anggaran untuk penanggulangan pandemic Covid-19. Kecamatan Sumur Bandung mengalokasikan sebesar Rp. 2.289.910.537,87 atau sebesar 10,52% dari pagu anggaran kegiatan.

Dengan terjadinya pandemic Covid-19, banyak kegiatan yang tertunda dan bahkan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terkait dengan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang tidak menganjurkan untuk berkerumun. Sementara, banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan warga, seperti rapat, sosialisasi dsb. Pembatasan jumlah peserta dalam kegiatan, pembatalan kegiatan dan merubah pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi menyebabkan penurunan penyerapan anggaran untuk kegiatan.

Di Akhir tahun 2020, untuk menyesuaikan komponen belanja dengan dengan yang dibutuhkan diakomodir dalam APBD Perubahan, penyesuaian komponen belanja

untuk menyesuaikan kegiatan kegiatan yang masih bisa dilaksanakan dengan kondisi yang serba terbatas tetap bisa terealisasi.

Adapun Pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Sumur Bandung per sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.20
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung per sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	2,784,270,402.26	2,468,293,220.00	88.65%
2.	Kelurahan Unggul	3,213,357,970.00	3,049,311,430.00	94.89%
3.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2,288,808,354.47	1,976,474,210.00	86.35%
	JUMLAH	8,286,436,726.73	7,494,078,860.00	90.44%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020

Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,027,132,736.26	830,343,262.00	80.84%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,150,480.00	87,667,457.00	73.58%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	29,800,000.00	9,888,400.00	33.18%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,660,000.00	3,550,000.00	96.99%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19,500,000.00	13,770,000.00	70.62%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	82,123,170.25	79,055,145.00	96.26%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98,866,600.00	82,137,900.00	83.08%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,286,100.00	7,607,500.00	91.81%
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,398,700.00	29,324,900.00	76.37%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43,575,700.00	29,847,000.00	68.49%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19,567,000.00	15,994,000.00	81.74%

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	120,954,818.01	91,222,960.00	75.42%
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50,000,168.00	5,028,000.00	10.06%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	393,250,000.00	375,250,000.00	95.42%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	679,777,666.00	575,615,330.00	84.68%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	210,357,666.00	208,948,381.00	99.33%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	469,420,000.00	366,666,949.00	78.11%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%
Kegiatan Pembinaan RT RW	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,533,062,670.00	1,507,473,230.00	98.33%
Pemeliharaan RTH Kecamatan	1,489,715,900.00	1,470,417,700.00	98.70%
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	43,346,770.00	37,055,530.00	85.49%
Program Perlindungan Sosial Bencana	202,660,000.00	191,400,000.00	94.44%
Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	202,660,000.00	191,400,000.00	94.44%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,477,635,300.00	1,350,438,200.00	91.39%
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	20,012,000.00	-	0.00%
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	1,132,112,000.00	1,096,395,750.00	96.85%
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	288,108,800.00	229,822,700.00	79.77%
Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	25,034,000.00	12,220,000.00	48.81%
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	12,368,500.00	11,999,750.00	97.02%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	2,288,808,354.47	1,976,474,210.00	86.35%
Pemberdayaan Lingkup RW	1,836,682,372.47	1,559,551,810.00	84.91%
Pemberdayaan lingkup PKK	175,428,890.00	171,196,100.00	97.59%
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	91,492,832.00	73,730,000.00	80.59%
Pemberdayaan Lingkup LPM	185,204,260.00	171,996,300.00	92.87%
JUMLAH	8,286,436,726.73	7,494,078,860.00	90.44%

Pencapaian realisasi sebesar 90,44 % ini dianggap cukup tinggi dengan kondisi yang serba terbatas karena pandemic Covid-19.

Tabel 3.22
Sasaran dan Realisasi Anggaran
Berdasarkan Program Kegiatan

Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Sasaran 1			
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,027,132,736.26	830,343,262.00	80.84%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,150,480.00	87,667,457.00	73.58%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	29,800,000.00	9,888,400.00	33.18%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,660,000.00	3,550,000.00	96.99%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19,500,000.00	13,770,000.00	70.62%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	82,123,170.25	79,055,145.00	96.26%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98,866,600.00	82,137,900.00	83.08%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8,286,100.00	7,607,500.00	91.81%
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,398,700.00	29,324,900.00	76.37%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43,575,700.00	29,847,000.00	68.49%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19,567,000.00	15,994,000.00	81.74%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	120,954,818.01	91,222,960.00	75.42%
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50,000,168.00	5,028,000.00	10.06%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	393,250,000.00	375,250,000.00	95.42%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	679,777,666.00	575,615,330.00	84.68%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	210,357,666.00	208,948,381.00	99.33%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	469,420,000.00	366,666,949.00	78.11%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%
Kegiatan Pembinaan RT RW	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%
JUMLAH	2,784,270,402.26	2,468,293,220.00	88.65%
Sasaran 2			
Kelurahan Unggul			
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,533,062,670.00	1,507,473,230.00	98.33%
Pemeliharaan RTH Kecamatan	1,489,715,900.00	1,470,417,700.00	98.70%
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	43,346,770.00	37,055,530.00	85.49%
Program Perlindungan Sosial Bencana	202,660,000.00	191,400,000.00	94.44%
Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	202,660,000.00	191,400,000.00	94.44%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,477,635,300.00	1,350,438,200.00	91.39%
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	20,012,000.00	-	0.00%
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	1,132,112,000.00	1,096,395,750.00	96.85%
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	288,108,800.00	229,822,700.00	79.77%
Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	25,034,000.00	12,220,000.00	48.81%
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	12,368,500.00	11,999,750.00	97.02%
JUMLAH	3.257.439.170	3.048.511.430	93.59%
Sasaran 3			

Tingkat Pemberdayaan Masyarakat			
Program Pemberdayaan Kewilayahan	2,288,808,354.47	1,976,474,210.00	86.35%
Pemberdayaan Lingkup RW	1,836,682,372.47	1,559,551,810.00	84.91%
Pemberdayaan lingkup PKK	175,428,890.00	171,196,100.00	97.59%
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	91,492,832.00	73,730,000.00	80.59%
Pemberdayaan Lingkup LPM	185,204,260.00	171,996,300.00	92.87%
JUMLAH	2,288,808,354.47	1,976,474,210.00	86.35%

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.23
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Rata rata Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,				
1	Melebihi/Melampaui Target	2	252,9	5.517.604.650	92.00%
2	Sesuai Target	0	0	-	-
3	Tidak Mencapai Target	0	0		
4	Tidak dapat diukur	0	0		
B.	Misi 2,				
1	Melebihi/Melampaui Target	1	318.78	1.976.474.210	88.35%
2	Sesuai Target	0	0		
3	Tidak Mencapai Target	0	0		
4	Tidak dapat diukur	0	0		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan sudah cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya mencapai atau lebih dari 100%, sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Untuk misi 1 yaitu realisasi sebesar Rp. 5.517.604.650.00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 5.997.628.372.26 atau **92,00%** dengan pencapaian sasaran organisasi rata rata sebesar **252,90 %** dari total anggaran yang dialokasikan.

Untuk efisiensi sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu realisasi sebesar Rp. 2.468.293.220,00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.784.270.402.26 atau 88,65% dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar 105,8 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Untuk efisiensi sasaran Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu yaitu sangat efektif dan efisien dimana untuk pencapaian sasaran ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target. Namun demikian, target terpenuhi 100%, dimana semua temuan baik oleh BPK RI ataupun Inspektorat sudah ditindak lanjuti

Untuk efisiensi sasaran Prosentase Kelurahan Unggul yaitu realisasi sebesar Rp. 3.049.311.430,00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.213.357.970 atau 94,89 % dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar 400,00 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Untuk efisiensi sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat yaitu realisasi sebesar Rp. 1.976.474.210,00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.288.808.354.47 atau 86,35% dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar 318,78% dari total anggaran yang dialokasikan.



Tabel 3.24
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kecamatan Sumur Bandung
Periode Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	79	83.58	105.80%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,027,132,736.26	830,343,262.00	80.84%
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	679,777,666.00	575,615,330.00	84.68%
							Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	22,360,000.00	9,984,628.00	44.65%
							Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,055,000,000.00	1,052,350,000.00	99.75%
							TOTAL PER SASARAN	2,784,270,402.26	2,468,293,220.00	88.65%
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						105.80%				
TINGKAT EFISIENSI 17.5%										
TINGKAT EFEKTIFITAS 119.34 %										
2	Kelurahan Unggul	Persentase Kelurahan Unggul	%	25	100	400.00%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.514.976.500	1.349.638.200	89.09%
							Program Perlindungan Sosial Bencana	202,660,000.00	191,400,000.00	94.44%
							Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1.539.802.670	1.507.473.230	97.90%
							TOTAL PER SASARAN	3.257.439.170	3.048.511.430	93.59%
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						400.00%				

TINGKAT EFISIENSI 306.41 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 427.41 %											
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	24.87	79.28	318.78%	Program Pemberdayaan Kewilayahan	2,288,808,354.47	1,976,474,210.00	86.35%
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						318.78%	TOTAL PER SASARAN	2,288,808,354.47	1,976,474,210.00
TINGKAT EFISIENSI 232.42 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 369.15 %											
								TOTAL KESELURUHAN	8.330.517.925	7.493.278.860	89.95%



3.2 Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2019 - 2023 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut disampaikan beberapa janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung yang sudah dilaksanakan, sebagai berikut:

Pemenuhan janji Wali Kota Bandung Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2020

No	Uraian	Keterangan
1	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Plus	1. Kecamatan Sumur Bandung sudah melaksanakan Kegiatan PIPPK Plus yang terdiri dari 37 RW dan 12 LKK dengan anggaran Rp. 4,810,085,183.95 yang alokasikan dalam Program Pemberdayaan Kewilayahan
2	Pusat Kreativitas Pemuda per wilayah	-
3	Youth Space di setiap kelurahan	-
4	Perpustakaan Keliling per kecamatan	1. Gerobak Baca Di Kecamatan Sumur Bandung
		2. taman baca di Kantor Kelurahan Braga
		3. Taman Baca di Taman Tongkeng Kel. Braga
		4. Sudut Baca di Kelurahan Kebon Pisang.
		5. Gerobak Baca di Kelurahan Merdeka
		6. Sudut Baca di RW 03, 08 dan 09 Kelurahan Kebon Pisang
		7. Geobak Baca di Kelurahan Babakan Ciamis
		8. Gerobak Baca di RW 01, 02, 03, 04, 06, 07, dan 08 Kel. Babakan Ciamis
5	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Per Kelurahan	-
6	Pusat Pelayanan dan Kreatiitas anak per Kelurahan	-
7	Kampung Wisata di setiap wilayah	1. Kampung Warna Cibunut RW 07 Kel. Kebon Pisang
		2. Co-working space di RW 08 Kelurahan Braga
8	Revitalisasi sarana olah raga per kecamatan	-
9	Bank Sampah Per Kecamatan	1. BANK SAMPAH CERIA Kantor Kec. Sumur Bandung

		2. RW. 07 BABAKAN CIAMIS GSG Jl. Babakan Ciamis RT. 07/07 Kel. Babakan Ciamis
		3. BRAGA BERJAYA Kantor Kel. Braga Jl. Tera No. 50 Bandung
		4. SAJARI (Sampah Jadi Rezeki) Gg. Apandi Kantor RW. 04 Kel. Braga
		5. BINEKAS Gg. Apandi Kantor RW. 08 Kel. Braga
		6. GEMAH RIPAH Kantor RW. 03 Gg. Cikapundung Kel. Braga
		7. SUGIH MUKTI Kantor RW. 05 Gg. Enur Kelurahan Braga
		8. BANK SAMPAH OH DARLING Gg. Cibunut RW. 07 Kel. Kebon Pisang
		9. SOMEAH (Sok Memilah Sampah) Gg. Surareja (Pos RW. 09) Kel. Kebon Pisang
10	Pusat Pemberdayaan ekonomi dan Kreativitas Per Kecamatan	-
11	Peningkatan Insentif RT dan RW	Insentif RT Rp. 300.000 dan RW Rp. 500.000
12	Menciptakan satu Koperasi Juara Setiap Kelurahan	-
13	Peningkatan Insentif guru mengaji	-
14	Satu koperasi masjid di setiap masjid jami' kelurahan	-
15	Gerakan menyemarakkan rumah ibadah	1. Gerakan Magrib Mengaji

3.3 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama 2020, sebagai berikut :

Tingkat Regional

1. Juara I Spanduk Terbaik Hari Ulang Tahun LPM ke-20
2. Peringkat ke-10 besar Kinerja Camat Terbaik se-Kota Bandung
3. Juara Harapan I Lomba Buruan SAE

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105.80 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 400.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 318.78 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.330.517.925 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.493.278.860, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 837.239.065

Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 105.80 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 400.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 318.78 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 8.330.517.925 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung adalah 89.95 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 5 Januari 2020
CAMAT SUMUR BANDUNG



PEMERINTAH KOTA
KECAMATAN
SUMUR
BANDUNG

Dra. Hj. SRI MAYANINGSIH, M.Si
NIP. 19630503 198503 2 012